

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah dan memiliki penduduk yang tergolong padat dan salah satu negara terpadat di Asia Tenggara, total penduduk di Indonesia berjumlah 266 juta jiwa, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak di Kawasan tersebut, jika dibandingkan dengan negara Filipina yang memiliki 109.6 Orang pada tahun 2020 data tersebut diambil dari CEIC data. Hal tersebut ada dampak positif dan negatif, Adapun dampak positifnya ialah akan meningkatnya sumber daya manusia, semakin banyak peluang untuk melakukan bisnis, dan meningkatnya solidaritas bangsa, Adapun dampak negatifnya ialah mulai dari pengemis, anak terlantar, anak jalanan dan lain sebagainya. Masyarakat sosial menyebutnya sebagai PMKS, yang memiliki arti dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memiliki problematika kemiskinan hidup.

Kemiskinan dan juga kesejahteraan sosial merupakan masalah umum yang selalu dihadapi dan di hadapkan oleh negara-negara yang tergolong berkembang seperti di Indonesia. ¹Adapun pemerintah dari negara-negara yang terkesan tidak dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi negaranya tersebut, bahkan tidak

¹ Eko Heru Firdaus¹, Edy Widodo², “Pengelompokan Data PMKS Menggunakan Metode Self Organizing Maps” *Jurnal LP3M – Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*-Vol.4, No.1. Vol.4, No.1, (2018) hlm.1.

sedikit juga negara yang memiliki jumlah penyandang kesejahteraan yang banyak di bantu oleh negara tetangga maupun negara yang sudah memiliki golongan negara adidaya maupun, seperti Amerika Serikat, China, Rusia. ²

Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia berkaitan sangat berkaitan erat dengan kondisi dimana semakin melemahnya kekuatan ekonomi makro suatu negara, dan kebijakan ekonomi dari pemerintah yang belum bisa merangsang tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Merujuk pada hasil proyeksi data dari ILO yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun-tahun terakhir mencapai 129,6 juta, atau sekitar 66,3 % dari seluruh jumlah penduduk.³

Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta data jumlah data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020-2021 berjumlah sebanyak **637.457,00** jiwa melonjak naik jika kita bandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah **484.064,00** jiwa .⁴ Berdasarkan data yang di kutip dan di peroleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada 3.066.567 jumlah pekerja yang terkena dampak langsung akibat (Covid-19). Diantaranya terdiri dari 1.058.284 pekerja formal yang dirumahkan, 380.221 pekerja formal Ter- PHK, 318.959 pekerja informal terdampak, 34.179 Calon Pekerja migran Indonesia dan

² Zainal fadri ,” Upaya penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta, *jurnal Pengembangan Masyarakat islam*, Vol. 10, No. 1, (2019),hlm 1.

³ Gunawan Sridiyatmika, 2018, Keberadaan Komunitas Pengemis di Kota Yogyakarta Dalam Kajian Ips Mengenai Budaya Kemiskinan Akibat Proses Reproduksi Sosial. *Jurnal Sosialita*, “, Vol. 10, No.1, (2018) hlm.37.

⁴ Jayyidan Falakhi Mawaza, Zaenuddin, Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014),*jurnalSpirit Publik* Vol.15, No. 2, (2020), hal. 131-145.

465 Pemulangan pemagangan dan yang tidak lengkap datanya 1.274.459 dengan jumlah dan data tersebut salah satu faktor yang membuat semakin penyangang masalah kesejahteraan sosial.⁵

Penyangang masalah kesejahteraan sosial merupakan pilihan terakhir dan jalan alternatif dari masyarakat yang menderita kemiskinan untuk bertahan hidup, Terutama dimasa pandemic covid 19, hal tersebut yang menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.⁶ “Menurut Weinberg yang dimaksud masalah social adalah dimana situasi yang terdapat dalam masyarakat dan bertentangan dengan nilai nilai yang oleh masyarakat dianggap signifikan, dimana masyarakat membutuhkan suatu Tindakan dari seluruh elemen untuk merubah situasi tersebut”.⁷

Pemerintah memiliki wewenang penting dan juga berkewajiban dalam mensejahterakan masyarakatnya agar semua elemen masyarakatnya merasakan kesejahteraan secara social, ekonomi secara adil, jujur dan juga merata bagi masyarakat, berdasarkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2009 peran pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya.⁸ Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak -anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa pengemis, gepeng dan anak-anak jalanan

⁵ Imas Novita Juaningsih, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” *Jurnal hukum dan keadilan*, Vol.4, No1, (2020). hal 192.

⁶ Parsudi suparlan, 1995, *kemiskinan di perkotaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal 50

⁷ Parsudi suparlan, 1995, *kemiskinan di perkotaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal 50

⁸ Syaifful Akbarudin, ”peran pemerintah dalam upaya penanganan penyangang masalah kesejahteraan sosial melalui program permakanaan oleh dinas sosial kota Surabaya” *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, “ Vol4, No 2, (2018), hal.7

dipelihara atau diberdayakan oleh negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah.⁹ Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gelandangan dan pengemis dan lain sebagainya, dan apabila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “ Setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan juga hidup yang layak bagi kemanusiaan”¹⁰ dalam pasal ini dapat di simpulkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menjaga dan juga memperbaiki kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat, pemerintah juga wajib memberikan perhatian dan memperbaiki hidup yang layak bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan social terutama kebutuhan primer. Namun demikian, pada kenyataannya kehadiran pengemis masih banyak terlihat khususnya di perkotaan seperti di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah dan sekolah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah Daerah Darerah Istimewa Yogyakarta Dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial?
2. Apa faktor kendala pemerintah pemerintah Daerah Darerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial?

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang di ambil, peneliti menerangkan bagwa manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui Upaya pemerintah Daerah Darerah Istimewa Yogyakarta Dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah pemerintah Daerah Darerah Istimewa Yogyakarta Dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan social

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melihal ada 2 manfaat secara teoritis dan prsktis, anantara lain;

1. Secara teoritis :
 - a. Penelitian Dapat membantu Membandingkan antara teori yang di dapatkan di bangku perkuliahan dengan realita yang terjadi di dalam lapangan
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan dan juga menjadi contoh penelitian dan bidang yang sejenis
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah pengetahuan dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah yang nyata
 - b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial
 - c. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebgai bahan tambahan informasi, baik bagi peneliti lanjutan dan lain sebgainya.

- d. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan antara teori dan juga praktik di lapangan.
- e. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan umum masyarakat fungsi dan juga tugas pemerintah daerah dalam menanggulangi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- f. Penelitian ini dapat menjadi info kepada masyarakat umum, hal apasaja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mrnanggulangi PMKS
- g. Penelitian ini dapat untuk mengetahui stuktur organisasi dari dinas sosial, tugas dari fungsi dari unit penanghulangan PMKS.